

KURIOSITAS

Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan

Volume 13

No.2, Desember 2020

Halaman 167-197

The Moderatism and Religious Conservatism Problems in the Middle of Covid-19 Pandemic Era

Abd Hannan¹, Fithriyah Rahmawati², Ahmad Imam Khairi³

IAIN Madura

hannan.taufiqi@gmail.com, fithriyahrahmawati90@gmail.com,
khairi.ahmadimam@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the phenomenon of religious conservatism and strengthening of religious moderation in the midst of the global pandemic, Covid-19. There are three problems of the research focuses in this study, namely religious moderation, religious conservatism, and the Covid-19 itself. By using a qualitative research and analysis based on social theory, this study has two important findings. Firstly, one of the problems that has often hampered the agenda for dealing with Covid-19 in many countries in the world, including in Indonesia that comes from conservatism in the religious sector. Contrasting the handling of Covid-19 with religious texts so as to make the response to Covid-19 not optimal and ineffective. In addition, the idea of religious moderatism in the midst of the Covid-19 pandemic requires three (3) things, they are the rationality, inclusivity, and contextually. Moderate in the rational sense means responding to Covid-19 with common sense and a logical attitude. It does not clash religion and science (medical), but puts them both in a dialogical and integrative manner. Meanwhile, being moderate in the sense of inclusion requires willingness and self-awareness to always take an active role. Comply with all forms of Covid-19 mitigation that have been mutually agreed upon based on consensus government policies. Moderatism in a contextual sense means that understanding Covid-19 requires comprehensive observation and attitude by considering its sociological aspects such as cultural dimensions, social systems and patterns of community interaction.

Keyword: Religious moderation; Conservatism; Covid-19

ABSTRAK

Studi ini membahas fenomena konservatisme keagamaan dan penguatan moderasi beragama di tengah pandemi global, Covid-19. Terdapat tiga permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam studi ini, yaitu; moderasi beragama, konservatisme keagamaan, dan terakhir adalah Covid-19. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan analisa berdasarkan teori sosial, khususnya teori sosiologi agama, kajian ini mendapati dua temuan penting; *pertama*, salah satu persoalan yang selama ini kerap menghambat agenda penanggulangan Covid-19 di banyak negara dunia, termasuk di Indonesia, yaitu datang dari perilaku konservatisme di sektor agama. Mempertentangkan penanganan Covid-19 dengan teks-teks keagamaan sehingga membuat penanggulangan Covid-19 berjalan tidak maksimal dan tidak efektif; *Kedua*, gagasan moderatisme beragama di tengah pandemi Covid-19 meniscayakan pada tiga (3) hal; rasional, inklusif, dan kontekstual. Moderat dalam arti rasional artinya merespon Covid-19 dengan nalar sehat dan sikap yang logis. Tidak membenturkan agama dan ilmu pengetahuan (medis), melainkan memposisikan keduanya secara dialogis dan integratif. Sedangkan bersikap moderat dalam pengertian inklusif meniscayakan pada kesediaan dan kesadaran diri untuk senantiasa mengambil peran secara aktif. Mematuhi segala bentuk mitigasi Covid-19 yang telah disepakati bersama berdasarkan kebijakan pemerintah yang bersifat konsensus. Adapun moderatisme dalam arti kontekstual mengandung arti bahwa dalam memahami Covid-19 perlu pengamatan dan sikap komprehensif. Mempertimbangkan aspek sosiologisnya seperti dimensi kebudayaan, sistem sosial dan pola interaksi masyarakat.

Kata Kunci: Moderatisme beragama; Konservatisme; Covid-19

PENDAHULUAN

Pandemi global *coronavirus disease* atau yang popular dengan sebutan Covid-19 saat ini tengah menjadi ancaman serius bagi masyarakat dunia (Cook, 2020, 2020; Lazarus, 2020; J. Li et al., 2020). Keganasan virus tergolong menular ini tidak saja mengancam keberlangsungan hidup umat manusia, namun juga secara nyata telah menghadirkan kekacauan terhadap sistem dan tata kehidupan di banyak aspek. Mulai dari aspek kepemerintahan, pendidikan, politik, hingga pada aktivitas sosial yang

tergolong fundamental, yaitu ekonomi (Schnake-Mahl et al., 2020). Keganasan Covid-19 tergambar jelas dari jumlah korban meninggal yang hingga kini sudah melebihi angka 1 juta jiwa. Merujuk data real time, CSSE John Hopkins University yang berbasis di US, hingga tanggal 20 Oktober tercatat sebanyak 40,3 juta kasus Covid-19 di seluruh dunia. Korban meninggal sebanyak 1,12 juta, 27,6 juta dinyatakan sembuh, dan sisanya masih dalam proses perawatan (News & Information, n.d.). Tingginya mobilitas penduduk yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, disinyalir menjadi faktor mengapa penyebaran Covid-19 sulit dikendalikan dan teratasi. Dan hingga saat ini, belum ada satupun negara yang dinyatakan benar-benar steril Covid-19. Bahkan negara kelas adidaya seperti Amerika Serikat pun dibuat kewalahan. Terbukti berdasarkan data terbaru, Amerika menempati peringkat satu sebagai negara dengan kasus tertinggi. Angka ini jauh melebihi jumlah kasus di China yang pada awalnya dikenal sebagai lumbung Covid-19.

Besarnya bahaya dan ancaman Covid-19 pada akhirnya membuat negara-negara dunia mengambil sikap dan langkah tegas. Masing-masing dari mereka menerapkan regulasi dan kebijakan serbaketa, melakukan pembatasan berskala besar, membatasi gerak dan interaksi sosial masyarakat, dan memberlakukan aturan protokol kesehatan secara menyeluruh. Mempersempit ruang publik yang memungkinkan menarik keramaian dan perkumpulan massa. Mulai dari ruang publik di sektor pendidikan, ekonomi, hingga pada tempat ibadah yang notabene dikenal sebagai tempat sakral, tempat di mana penganut agama menjalankan aktivitas ritual peribadatannya seperti Masjid, Gereja, Pura, Wihara, dan Mushollah. Di beberapa negara seperti di Saudi Arabia, terhitung sejak 27 Februari 2020, pemerintah setempat melakukan pembatasan keramaian

melalui penghentian sementara aktivitas keagamaan di tempat peribadatan umum. Mulai dari sterilisasi dua tempat suci, Makkah dan Madinah (Chopra, 2020; Rahman & Sarkar, 2019). Penghentian sementara ibadah umrah, hingga pada ibadah tahunan yang terbilang sakral bagi ummat Islam, yakni ibadah haji (aljazeera.com, 2020).

Tidak saja di Arab Saudi, penghentian sementara aktivitas keagamaan di tempat peribadatan umum juga terjadi di Negara Iran. Di Iran, pemerintah setempat menerapkan pembatasan kunjungan terhadap dua tempat suci, Qom dan Mashhad, yang setiap harinya dikunjungi oleh ribuan peziarah. Di luar kedua negara Islam di atas, pembatasan aktivitas keagamaan yang juga terjadi di negara-negara non Islam. Di Korea Selatan, tepatnya di Gereja Yoido Full Gospe, aktivitas ibadah mingguan yang biasanya rutin dilaksanakan di Gereja akhirnya beralih ke prosesi ibadah secara online (Ghufron, 2020). Di Italia, tepatnya di Kota Roma, pihak Vatikan menutup semua gereja Katolik di seluruh penjuru Roma. Demikian mereka lakukan untuk menangkal dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang pada saat itu menulari banyak daerah di Italia. Khususnya daerah utara di Provinsi Bergamo (Amante, 2020). Satu rupa dengan ketiga negara di atas, Indonesia pun mengeluarkan kebijakan sama. Melalui fatwa MUI sebagai lembaga otoritatif di bidang keagamaan, pemerintah menerapkan regulasi protokol kesehatan secara ketat. Membatasi ruang perkumpulan dan keramaian hingga pemberhentian sementara aktivitas keagamaan di tempat peribadatan umum yang dimungkinkan menjadi tempat penularan corona. Tak tanggung-tanggung, MUI pun menghukumi keharaman menyelenggarakan ritual keagamaan di tempat peribadatan tersebut (MUI, 2020).

Menariknya, meski beberapa negara telah mengambil kebijakan tegas melakukan penangguhan sementara aktivitas ritual keagamaan di tempat peribadatan umum seperti Masjid, Gereja, Vihara, dan Pura, pada kenyataannya tidak semua pihak atau masyarakat mengindahkan peraturan tersebut. Bahkan beberapa kelompok keagamaan tertentu bersikap resisten, memilih untuk tetap melangsungkan ritual peribadatan umum meski sebelumnya telah ada himbauan dan larangan dari pemerintah (*Konservativisme Agama Dan Penyebaran Korona*, n.d.). Menariknya, sikap dan perilaku resisten ini datang bukan dari satu atau dua negara saja, namun datang dari banyak negara. Khususnya dari kelompok masyarakat yang secara keagamaan memiliki tradisi pemikiran keagamaan yang sangat kaku dan normatif, atau yang dalam diskursus keagamaan kontemporer kita mengenalnya sebagai kelompok keagamaan konservatif. Baik di Islam, Kristen, Katolik ataupun Budha, memiliki aliran-aliran khusus yang masuk dalam katagori ini.

Munculnya sekian fenomena di atas secara langsung mengindikasikan bahwa di tengah krisis sosial akibat pandemi Covid-19, sesungguhnya saat ini kita tengah dihadapkan pada persoalan cukup krusial yang berkaitan dengan konservatifme beragama. Makna konservativisme yang mengandung arti cara beragama yang berpegang secara ketat pada kitab suci atau ajaran ortodoksi dan tradisi yang dianggap paling benar, pada kenyataannya melahirkan problem tersendiri (Azra, 2019). Dalam hal penanggulangan Covid-19, problem konservativisme beragama ada pada pandangan mereka yang senantiasa memperlihatkan sikap egoisme beragama, membenturkan agama dan ilmu pengetahuan, bahkan mencurigai sains sebagai ancaman terhadap agama (Hilmy, 2020). Di sinilah kemudian dibutuhkan sebuah cara pandang beragama yang

lebih universal, mampu mendudukkan akal sehat dan keyakinan secara seimbang. Tidak ekstrim kanan dengan artian tekstual dan ahistoris, tidak juga ekstrim kiri dalam arti liberal dan sekularis. Secara teoritik, tradisi beragama seperti ini dikenal dengan istilah moderatisme.

Berlandaskan kerangka pikir di atas, penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk mengkaji gagasan moderatisme dan problem konservatisme agama di tengah pandemi global, Covid-19. Beberapa isu krusial yang bersentuhan langsung dengan tema moderatisme, konservatisme, dan covid-19, ketiganya merupakan tema pokok yang akan banyak dikaji dalam penelitian ini. Secara metodologi, kajian ini berlandaskan pada jenis penelitian kualitatif, menggunakan analisa berdasarkan teori-teori sosial, khususnya teori sosiologi agama. Dengan mengangkat ketiga fokus masalah di atas, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan luaran signifikan, berisikan rekomendasi fundamental bagi para pemangku kebijakan, dalam upaya menguatkan dan memaksimalkan penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pandemi sebagai Krisis Global

Sebagai krisis global, problem pandemi tidak saja ada di satu negara, namun menyebar luas ke banyak negara dunia. Pada awal kemunculannya ketika pertama kali terdeteksi di China, tidak banyak kalangan mengirakan jika Covid-19 akan berevolusi menjadi pandemi global (Carvalho Aguiar Melo & de Sousa Soares, 2020; Cook, 2020; Hamid, 2020; Williams, 2020). Bahkan beberapa negara dengan sesumbarnya mengatakan jika Covid-19 tidak akan masuk ke wilayah mereka, salah satunya datang dari pernyataan Menteri Kesehatan Indonesia, Terawan (Rina, 2020). Hanya, beberapa bulan setelahnya, pelan namun pasti Covid-19 mulai bergeser, menjangkiti

negara-negara dunia. Bukan saja lintas negara, namun merambah hingga lintas benua. Negara-negara maju seperti Singapore, Jerman, Inggris ikut terpapar dan dibuat lumpuh. Bahkan Amerika Serikat yang awal-awalnya sempat jemawa melalui pernyataan kontroversial Donald Trump, pada akhirnya harus bertekuk lutut akibat serangan wabah Covid-19 yang merenggut ratusan ribu warganya. Melihat betapa cepatnya penyebaran Covid-19, serta besarnya risiko kematian karenanya, maka wajar jika jauh hari sebelumnya organisasi kesehatan dunia melalui kepalanya, Tadros Adhanon Ghebreyesus menyatakan bahwa Covid-19 adalah pandemi global yang menjadi ancaman nyata umat manusia (Azizah, 2020).

Jika merujuk penjelasan WHO, ancaman terbesar Covid-19 sesungguhnya tidak saja karena virus ini menyerang kesehatan dan menyebabkan kematian, karena secara medis Covid-19 memiliki tingkat resiko kematian lebih rendah daripada virus menular sebelumnya seperti SARS (R. Li et al., 2020; Shi & Hu, 2008; Yu et al., 2020). Ancaman tak kalah besar lainnya adalah bagaimana dunia akan merespon keberadaan virus ini. Respon dunia terhadap Covid-19 praktis akan memberi dampak signifikan terhadap stabilitas dan ekosistem tatanan global. Dan jika bercermin pada kondisi yang terjadi di Wuhan China, Italia, Korea Selatan, tiga dari sekain banyak negara yang lebih awal terpapar Covid-19, kemunculan Covid-19 berpotensi besar dapat mengubah sistem dan tatanan global di segala aspek. Dunia akan dihadapkan pada *shocking of social system*, di mana aktivitas sosial manusia akan mengalami perubahan dan pergeseran cukup radikal (aljazeera.com, 2020; Prem et al., 2020). Celakanya, tidak semua negara memiliki kemampuan merespon kondisi ini. Sehingga besar kemungkinan akan ada di antara mereka yang akan mengalami masa-masa sulit untuk dapat merespon serangan virus, serta

memenuhi kebutuhan sektor primer setiap warganya, terkhusus yang bersentuhan dengan kebutuhan ekonomi.

Bagaimana dengan sektor di luar ekonomi? Tak jauh beda dengan aktivitas ekonomi, sektor sosial lainnya pun mengalami kondisi sama. Mulai dari pendidikan, kebudayaan, hiburan, kepemerintahan, bahkan pada yang sifatnya sakral sekalipun, yaitu aktivitas keagamaan. Menyikapi situasi darurat ini, negara-negara dunia pun fokus melakukan pananggulangan supaya daerah mereka benar-benar bebas dari Covid-19. Kebijakan pengetatan pun tak terhindarkan meski pada saat bersamaan mereka harus mengorbankan sektor ekonomi, terjadi pembatasan sosial besar-besaran demi memutus rantai penularan Covid-19. Hanya, sayangnya pada tataran praktinya kebijakan ini tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, karena pada saat bersamaan muncul sikap kontra, atau bahkan penolakan dari beberapa kelompok masyarakat untuk membatasi aktivitas sosial mereka. Jika mencermati dinamika yang terjadi selama masa pananggulangan Covid-19, umumnya respon negatif tersebut paling dominan berkisar pada dua isu besar, yakni isu ekonomi dan isu keagamaan.

Problem Keagamaan di Tengah Pandemi

Salah satu kendala penerapan protokol kesehatan dalam upaya memerangi keberadaan dan penyebaran Covid-19, selain berupa himpitan ekonomi, problem tak kalah krusialnya adalah faktor keagamaan (Perdanakusuma, 2020). Dalam kaitan ini, keberadaan kelompok masyarakat yang secara keagamaan mempunyai tradisi beragama yang kaku, normatif, tekstual, dan ahistoris, di banyak kesempatan senantiasa memperlihatkan sikap berseberangan dengan visi penanggulangan Covid-19. Celakanya, dibanding kelompok lainnya, kelompok berbasis agama ini

mempunyai pendirian dan perlawanan lebih kuat dan keras. Demikian dipengaruhi oleh konstruksi pemahaman mereka yang melihat agama sebagai realitas non profan, realitas suci yang dipenuhi oleh simbol-simbol keagungan dan sakralitas. Ketika elemen ini sedikit tersentuh dan terprovokasi, maka yang muncul adalah perilaku perlawanan totalitas yang dapat berujung konflik dan kekacauan lebih besar. Merujuk pada tesis Thomas Carlyle (2018), agama adalah sebuah pengalaman yang sangat pribadi dan bermakna. Begitu bermaknanya sehingga orang rela kehilangan nyawa untuk mempertahankannya. Mereka yang menghayati agama tak ubahnya orang yang tengah mengalami perasaan jatuh cinta (Lvov, 2018). Sebagai orang yang tengah dilanda asmara mendalam *alias* 'mabuk agama', dirinya akan mempertahankan sekutu tenaga meski harus bertentangan dengan realitas yang ada di sekitarnya.

Menariknya, bercermin pada banyak pristiwa yang terjadi selama ini, problem keagamaan yang terjadi di seluruh dunia selama masa penanggulangan Covid-19, itu ditemukan tidak di satu atau dua negara saja, namun terjadi di banyak negara. Di Indonesia misalnya, di tengah intensnya pemerintah mangkampanyekan pengetatan acara keramaian, masih saja di beberapa daerah tidak sedikit masyarakat yang *ngotot* melangsungkan acara keramaian, terutama yang bermotif keagamaan. Di Kalaten Jawa Tengah, berlangsung upacara melasti di Umbul Geneng yang mengundang perkumpulan massa sebanyak 3.000 orang (Lesmana, 2020). Perayaan keagamaan Nyepi di Bali dan Jakarta tetap dijalankan walau dengan dalih dibatasi, masuk di dalamnya juga pelaksanaan Melasti di Jolotonfo, Jawa Timur (Pandia, 2020). Tetap dilaksungkannya peringatan Isra Mikraj di beberapa tempat, termasuk acara Rajab an di Karawang yang melibatkan jemaah dengan acara salawatan, pengajian, dan ceramah agama

(Dariyanto, 2020). Dan paling mengundang perhatian dan sorotan publik adalah Ijtima Dunia kelompok Jamaah Tabligh di Gowa, Sulawesi Selatan. Meski pada akhirnya acara ini batal terselenggara, namun pada saat itu terkumpul sedikitnya 8.000 orang dari banyak dan mancanegara. Dan benar saja, selang beberapa hari setelah tim medis di seluruh Indonesia melakukan penelusuran terhadap peserta yang hadir dalam acara perkumpulan tersebut, beberapa orang diketahui positif mengidap Covid-19. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, lebih dari 1.500 orang berkumpul mengikuti upacara Penasbihan Uskup Ruteng Mgr Sipianus Hormat (Belarminus, 2020). Surat gugus tugas percepatan penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat tidak mendapat tanggapan serius. Satu rupa dengan Gowa dan NTT, yaitu Gereja Katolik di Surabaya. Uskup di Gereja ini memilih tetap melaksanakan ibadah mingguan secara normal, dengan dalih jika para jamaahnya sudah mempunyai daya kekebalan tubuh yang cukup kuat untuk dapat melangsungkan peribadatan di tempat umum. Tetapi dilaksananya aktivitas keagamaan di tempat peribadatan umum mengundang perhatian dari banyak kalangan. Dan buntutnya, beberapa hari setelah pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut, masyarakat yang hadir pada ritual tersebut terkonfirmasi Covid-19, sehingga melahirkan klaster baru yang membuat penyebaran Covid-19 semakin banyak dan meluas.

Selain dari Indonesia, fenomena sama juga datang dari Negara Pakistan. Kelompok muslim ultra-konservatif di negara setempat menolak melakukan karantina dan penghentian sementara aktivitas keagamaan (Welle, 2020). Ironisnya, pemerintah setempat berdalih tidak cukup mampu bertindak tegas, mengingat di Pakistan sendiri keberadaan kelompok

muslim ultra-konservatif mempunyai kekuatan dan kedudukan cukup kuat. Baik konservatif yang berbasis sekte Sunni maupun konservatif dari sekte Syiah. Para pemuka agama setempat menolak mentah-mentah himbauan pemerintah, bahkan memilih memobilisasi masyarakat agar tetap melangsungkan kegiatan agama di tempat peribadatan umum. Di beberapa daerah Pakistan seperti di Lahore, kegiatan shalat Jumat masih tetap berlangsung normal meski sebelumnya sudah ada kebijakan pelarangan dari pemerintah daerah setempat. Fenomena serupa juga ditemukan di Malaysia, pada 15 Maret 2020 sebanyak 190 kasus Covud-19 ditemukan, dan sebagian besar angka tersebut berasal dari kluster pengajian Tabligh Akbar yang sebelumnya berlangsung di Masjid Sri Petaling Kuala Lumpur pada 28 Februari hingga 1 Maret lalu (Iswara, 2020).

Jika merujuk sekian fakta di atas, problem keagamaan di tengah pandemi global Covid-19 yang banyak dilakukan oleh kalangan agamawan memunculkan satu hipotesis menarik. Hipotesis tersebut berkisar pada paradigma dalam memahami teks agama itu sendiri. Bahwa beragam sikap dan perilaku negatif yang diperlihatkan oleh kelompok keagamaan dalam merespon agenda penanggulangan Covid-19, itu semuanya muncul sebagai buah dari paradigma keagamaan mereka yang kaku. Hipotesis ini seolah menemukan jawabannya mengingat kelompok agama yang dijelaskan di muka, secara umum memiliki tradisi beragama yang relatif normatif dan menitikberatkan pada nilai-nilai konservativisme (Hannan & Muhammin, 2020). Memahami agama secara literal dan cenderung menjadikan nilai-nilai tradisi sebagai pedoman beragama yang final. Kekakuan beragama seperti ini membuat mereka bersikap eksklusif, menutup diri terhadap perkembangan isu-isu terkini, sehingga sulit bersikap akomodatif terhadap realitas yang ada.

Dari Anakronisme hingga Koservativisme

Ditinjau dari perspektif ilmu sosial, kasus berlangsungnya kegiatan keagamaan umum di tengah ancaman pandemi global Covid-19, itu dapat dilihat sebagai fenomena sosiologis yang memiliki motif dan faktor tersendiri. Sebagai bagian dari permasalahan sosial, fenomena demikian jelas tidak dapat diteropong melalui pendekatan struktural, memusatkan perhatian pada aspek-aspek eksternal seperti halnya nilai, norma, apalagi regulasi. Karena secara struktural jelas bahwa sudah ada regulasi atau aturan yang melangsungkan kegiatan keagamaan yang dapat mengundang keramaian. Satu-satunya motif atau faktor sosiologis yang memicu mengapa perilaku demikian terjadi, itu tidak lain dan tidak bukan adalah ada pada aspek konstruksi sosial mereka. Konstruksi sosial yang dimaksud di sini adalah dimensi subjektivitas diri dalam memahami dan memaknai Covid-19. Merujuk pada penjelasan Peter L. Berger, bahwa dalam memaknai realitas (Covid-19), setiap individu atau kelompok masyarakat senantiasa dipengaruhi paradigma berpikir mereka. Khususnya yang mereka produksi dari sistem kepercayaan dan pengetahuan mereka (Martindale, 1964). Semakin kaku paradigma berpikir, maka akan semakin kaku pula sikap dan perilaku yang akan mereke tonjolkan. Secara teoritik, kekakuan merespon Covid-19 karena lemahnya dasar pengetahuan merupakan wujud lain dari anakronisme berpikir. Sedangkan kekakuan beragama yang berujung pada tindakan negatif menyikapi Covid-19 itu merupakan representasi dari cara beragama yang konservatif. Pertanyaan besarnya, apa yang dimaksud dengan anakronisme berpikir dan konservativisme beragama?

Dalam diskursus keagamaan kontemporer, term anakronisme sesungguhnya bukan istilah baru. Term ini sudah sering dimunculkan,

khususnya untuk memotret perilaku masyarakat yang masih terjebak dengan mentalitas tradisionalis, terbelakang, dan jauh dari kemajuan berpikir ilmiah. Dibanding term sosial lainnya, memang penggunaan kata anakronisme tidak sepopuler seperti kata konservatisme, moderatisme, sekulerisme dan sejenisnya. Namun betapapun konsep ini jarang digunakan, istilah anakronisme masih memuat makna relevan untuk mencerminkan realitas kehidupan yang tidak mengandung relevansi dengan semangat zamannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anakronisme memuat arti ketidakcocokan dengan zaman atau waktu tertentu; penempatan tokoh, pristiwa percakapan dan unsur yang tidak sesuai menurut waktu di dalam karya sastra (Alwi, 2007). Dengan demikian, merujuk pada pengertian ini anakronisme berarti sebuah cara bersikap atau berpikir yang mengandung ketidaksesuaian dengan masanya, sehingga mereka yang tergolong anakronis berarti adalah pribadi yang secara pemikiran ketertinggalan zaman dan kolot, karena masih terkerengkeng oleh sistem dan nilai tradisional non ilmiah. Kaitannya dengan kajian ini, anakronisme merujuk pada individu atau kelompok masyarakat yang cenderung merespon Covid-19 melalui pendekatan tradisional non ilmiah daripada mengedepankan sikap rasional dan ilmiah.

Anakronisme tidak melulu tertuju pada kelompok masyarakat tradisionalis yang identik dengan mistifikasi dan hal abstrak. Anakronisme juga dapat ditujukan kepada kelompok masyarakat modern, masyarakat maju namun dalam kesehariannya mereka enggan menggunakan pendekatan ilmiah untuk merespon realitas atau permasalahan sosial di sekitarnya. Ketidakmampuan diri membangun nalar ilmiah dan kritis, pada akhirnya mendatangkan problem tersendiri, karena sikap dan perilaku yang mereka munculkan seringkali tidak menjalin korelasi dengan

tujuan yang dimaksud. Dalam kaitan ini, sikap anakronisme bukan saja membuat upaya penyelesaian permasalahan jalan di tempat, namun lebih dari itu semakin membuat parah, bahkan menambah masalah. Begitupun dalam proses penanggulangan Covid-19, selalu ada sikap non-ilmiah beredar luas di tengah masyarakat yang timbul karena konstruksi berpikir anakronisme. Pada tataran praktiknya, fenomena anakronisme ini tergambar jelas dari sikap dan perilaku kelompok masyarakat yang tetap *ngotot* menyelenggarakan aktivitas sosial berupa keramaian dan kerumunan, meski pada saat bersamaan ada ancaman penularan Covid-19. Penyakit anakronisme tergolong penyakit kultural yang bersentuhan dengan mentalitas, kebudayaan, dan sistem sosial diri. Karenanya, penyakit ini tidak dapat terselesaikan jika hanya melalui pendekatan struktural berbentuk kebijakan ataupun aturan.

Jika anakronisme identik dengan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang berpegang teguh pada sistem kebudayaan non ilmiah, maka beda halnya dengan konservatisme. Konsep konservatisme sejatinya sama-sama merujuk pada paradigma berpikir yang menitikberatkan pada tradisionalis, bedanya term ini lebih merujuk pada cara beragama yang kemudian ditransformasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam cara berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak (Azra, 2019). Ditinjau dari segi terminologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan konservatisme sebagai paham politik yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial, melestarikan pranata yang sudah lama ada, menghendaki perkembangan setapak demi setapak, serta menantang perubahan yang radikal. Itu artinya, konservatisme berarti paham yang menghendaki kemapanan terhadap bangunan sistem sosial lampau yang muncul sejak zaman terdahulu (Departemen Pendidikan dan

kebudayaan, 1999). Sekilas pengertian ini memiliki kesamaan dengan definisi anakronisme. Namun poin yang perlu digarisbawahi di sini bahwa yang dikehendaki oleh penggunaan term konservatisme lebih tertuju pada aspek keagamaan, bukan dalam arti di luarnya seperti kebudayaan, tradisi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Jika yang dikehendaki di sini adalah konservatisme keagamaan, pertanyaan besarnya adalah apa yang dimaksud konservatisme dalam beragama?

Beberapa literatur mendefinisikan konservatisme agama sebagai keinginan untuk mempertahankan doktrin 'murni' yang berasal dan dipraktikkan pembawa ajaran beratus tahun silam. Sedangkan di dunia akademik, konservatisme agama populer dengan sebutan '*religious conservatism*' atau '*religious conservatism*', Azumardi Azra memberikan definisi sebagai paradigma berpikir dan perilaku beragama yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran kitab suci yang diklaim kelompok konservatif sebagai rujukan paling benar (Azra, 2019; Burhani, 2019; Burhani & Simandjuntak, 2018; *Konservatisme Agama Dan Penyebaran Korona*, n.d.). Dalam perkembangan berikutnya, konservatisme mengalami proses evolusi menjadi neo konservatisme. Namun meski mengalami modifikasi terminologi, semua kalangan sepakat bahwa baik konservatisme maupun non konservatisme keduanya meniscayakan pada objek dan pengertian sama, yakni sama-sama menicayakan pada kehadiran kekakuan dalam beragama, baik dalam berpikir maupun bertindak. Tekstual, ahistoris, dan bersikap resisten terhadap isu-isu keagamaan kontemporer yang berbau modernis. Kelompok ini meyakini bahwa tidak ada jalan dan cara lain memperoleh ketenangan dan kenyamanan sejati kecuali dengan kembali pada ajaran dan amalan agama terdahulu, dan menghindari segala bentuk upaya pembaharuan seperti yang saat ini

dikampanyekan oleh kalangan modernis (Haryanto, 2019). Sebagai sebuah paham keagamaan, kelompok konservatisme ada di setiap agama-agama dunia, baik itu Islam, Kristen, Budha, dan lain sebagainya.

Kaitannya dengan kajian ini, konservatisme agama dapat diidentifikasi dalam diri kelompok Islam yang senantiasa menunjukkan respon negatif terhadap agenda penanggulangan Covid-19. Respon negatif yang dimaksud adalah sikap resisten mereka yang memilih tidak mengikuti anjuran protokol kesehatan. Ciri paling jelas jelas dari kelompok ini adalah seringkali mempertentangkan agenda mitigasi Covid-19 dengan teks-teks keagamaan. Bahwa Covid-19 adalah bagian dari upaya kelompok tertentu untuk menjalankan misi pelemahan terhadap eksistensi agama atau keyakinan mereka, sehingga mengikuti aturan penanggulangan Covid-19 sama halnya dengan membuat agama semakin lemah dan terancam. Karena cara berpikirnya tersebut, kelompok ini lebih memilih tetap melangsungkan kegiatan atau aktivitas keagamaan secara normal, menyelenggarakan ritual agama di tempat peribadatan umum tanpa menerapkan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah. Di Indonesia, potret fenomena konservatisme agama yang mempertentangkan agama dengan Covid-19 tercermin pada kegiatan Penasbihan Uskup Ruteng Mgr Sipianus Hormat di NTT, Ijtima' Dunia yang diselenggarakan oleh kelompok Jamaah Tabligh di Gowa, Sulawesi selatan, serta pelaksanaan ibadah mingguan di Gereja Katolik di Surabaya. Sebagai sebuah paham global, problem konservatisme tidak saja ada dan melanda Indonesia, namun juga di negara-negara dunia lainnya, terkhusus negara yang sejauh ini memiliki akar tradisi keagamaan kuat (nonsekuler), seperti Pakistan, Iran, India, dan lain sebagainya.

Moderatisme dan Landasan Teologi Pandemi

Seiring menggeliatnya perilaku konservatisme beragama di tengah krisis pandemi global Covid-19, praktis mengudang kerisauan tersendiri dari banyak pihak, khususnya pemerintah yang secara struktural memiliki tanggung jawab menjalankan mitigasi Covid-19. Egoisme beragama kelompok konservatif yang tetap memaksakan diri menjalankan ritual agama secara normal di tempat peribadatan umum, praktis bukan saja dapat mempersulit misi penanggulangan Covid-19, namun juga dapat mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Menjalankan ritual secara ramai di ruang publik, itu artinya memberi celah dan peluang menularnya virus, sehingga penyebarannya dapat semakin meluas ke banyak orang, tempat, dan daerah. Merespon hal tersebut, beragam seruan dan himbauan datang dari banyak pihak. Mulai dari seruan mempertegas regulasi pengetatan dalam bentuk pemberian hukuman dan denda, hingga pada seruan sosial keagamaan, yakni memperkuat pemahaman keagamaan yang moderat, sehingga perilaku egoisme beragama di tengah pandemi Covid-19 dapat ditekan. Sebagai tindak lanjutnya, seruan penguatan moderasi agama pun kian nyaring dimunculkan, hal ini sebagai respon terhadap fenomena konservatisme beragama di tengah kondisi darurat, Covid-19.

Sebagai bagian dari diskursus keagamaan kontemporer, terminologi moderatisme sesungguhnya bukan barang baru dalam perbendaharaan kosa kata. Istilah ini sudah lama ada, bahkan seolah menjadi terminologi umum yang lazim digunakan banyak pihak, khususnya untuk menangkal setiap paham atau gerakan keagamaan berbau ekstrim. Baik ekstrim kanan kelompok fundamentalis radikal maupun ekstrim kiri kelompok sosial-komunis sekularisme. Konsep moderatisme diidentifikasi banyak pihak sebagai jalan tengah (*the Third Way*) untuk mengakomodir atau merangkul dua kutub tradisi yang saling menegaskan.(Siswanto, 2020) Di sektor

politik, moderatisme dipahami sebagai jalan politik kerakyatan untuk keluar dari jeratan kelompok kapitalis dan kelompok komunis. Sedangkan di level agama, moderatisme adalah representasi beragama dalam bingkai inklusif yang tidak berpijak pada ajaran kaum fundamentalis dan tidak pula pada kaum liberalis. Tidak melihat teks-teks agama secara normatif dan kaku, pun demikian tidak menjadikan akal atau rasio sebagai satu-satunya tolok ukur kebenaran. Sebaliknya, moderatisme menempatkan akal dan teks agama pada posisi saling berhubungan dan dialogis, bukan dalam arti saling menegasikan dan bertentangan.

Secara etimologi, moderatisme memuat arti paham yang senantiasa menghindarkan perilaku atau pengungkapan ekstrem; berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, kecenderungan mempertimbangkan pandangan pihak lain (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999). Paling tidak, ada dua kata kunci dari definisi ini; ekstrim dan jalan tengah. Ekstrim berarti terujung, melebihi dari kadarnya, menunjukkan pada hal paling memuncak, paling keras, atau bisa juga mengandung hal fanatisme. Sedangkan kata jalan tengah mengandaikan pada sikap kesedangan, netral, dan seimbang. Tidak condong kanan dan tidak pula condong kiri. Jika merujuk pada dua kata kunci ini, moderatisme beragama mengandung arti sebagai paradigma beragama yang senantiasa menjauhkan diri dari perilaku keras, menghindarkan diri dari keberpihakan terhadap kelompok manapun, baik keberpihakan pada kelompok kiri maupun kelompok kanan (Hilmy, 2009). Singkatnya, moderatisme memuat definisi sikap, perilaku, dan tindakan yang menitikberatkan pada kehalusan, kelembutan, inklusivitas, dan kesediaan diri merangkul semua orang, sekalipun memiliki latar berbeda. Karenanya, sosiolog muslim kontemporer, Khaled Abu Fadl dalam Rusdi (2009) memposisikan istilah moderatisme sebagai

kebalikan dari kata puritanisme, yakni sebuah paham keagamaan yang memiliki tradisi berpikir tekstual, ahistoris, normatif, dan eksklusif (Syarif & Hannan, 2020). Pada umumnya, kelompok ini memiliki ciri mudah menyalahkan tradisi keagamaan di luar mereka, dan memiliki semangat untuk kembali ke ajaran agama yang dianggap mereka sebagai kebenaran tunggal.

Merujuk pada penjelasan Masdar Hilmy, dirinya mengidentifikasi kata moderat kepada setiap kelompok atau individu yang tidak menjadikan kekerasan atau anarkisme sebagai instrumen atau ideologi perjuangan (Hilmy, 2009). Sebaliknya, dirinya lebih memilih melandaskan paradigma keagamaan yang halus, lembut, dan persuasif. Baik paradigma dalam berpikir, bersikap, hingga bertindak. Dengan paradigma tersebut, moderatisme lebih dikenal dinamis, luwes, dan mudah menjalankan proses adaptasi dengan setiap realitas sosial yang ada di dalamnya. Kemampuan melakukan adaptasi diri tersebut pada akhirnya membuat keberadaan moderatisme mudah diterima masyarakat dari lintas golongan atau kelompok. Namun di luar itu semua, tak jarang juga kelompok ini mendapat cibiran, karena dinilai terlalu cair dan luluh terhadap kelompok keagamaan di luar Islam, sehingga dianggap dapat mendatangkan menyimpangan dan penyesatan. Tak jarang juga kelompok ini dituduh antek agama lain, bersekongkol dengan Yahudi dan sebagainya. Tuduhan semacam ini tidak lepas dari sikap mereka yang dalam banyak hal seringkali memilih bersikap moderat merespon isu-isu sosial-keagamaan kontemporer. Termasuk dalam hal merespon Covid-19 beserta segala bentuk agenda penanggulangannya.

Bagi kelompok Islam moderat, hal menyangkut penanggulangan Covid-19, itu tidak perlu diperdebatkan. Keberadaannya sudah jelas-jelas

menemukan sumber kebenarannya, baik secara historis maupun teks keagamaan. Secara historis, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya menerangkan tentang dua peristiwa wabah dalam sejarah Islam. *Pertama*, yang terjadi pada sekitar masa Nabi Muhammad SAW. Seperti diketahui, penyerangan Abrahah terhadap Ka'bah di Makkah gagal karena jenderal Habasyah dan pasukannya itu didera wabah semacam cacar. *Kedua*, *Tha'un* pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa khalifah Umar, penyakit menular *Tha'un* menjangkiti daerah Jazirah Arab. Daerah seperti Baghdad, Aljazair, dan Iraq menjadi wilayah paling terdampak. Pada masa ini, wabah *Tha'un* memakan korban hingga menyentuh angka 25 ribu orang jiwa (Ichsan, 2020). Sedangkan secara tesktual, sekurang-kurangnya terdapat tiga hadist yang berbicara tentang penyakit *Tha'un* yang masing-masing diriwayatkan oleh Hafsa binti Sirin, Aisyah Ra, dan Usamah Ra. Salah satu bunyi Hadistnya adalah sebagai berikut; "*Thaun adalah wabah yang dikirim kepada satu kelompok dari Bani Israil atau kepada orang-orang sebelum kalian. Jika kalian mendengarnya di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan jika Thaun menjangkiti suatu negeri sementara kalian disana maka jangan keluar untuk menghindarinya.*" Abu Nadhr berkata, *Jangan ada yang membuatmu keluar selain untuk menghindarinya.*' (HR Al Bukhari). Jika berlandaskan pada Hadist ini, jelas disebutkan bahwa penyakit berbentuk wabah bukan hal baru dalam Islam, bahkan itu sudah terekam lama sejak kehidupan bani Israil. Pun demikian menyangkut upaya mitigasi ketika wabah itu datang, yaitu anjuran agar menjauhi daerah yang terinfeksi wabah, serta anjuran untuk tidak keluar jika daerah yang ditinggali sudah terpapar wabah. Anjuran ini jika diterjemahkan ke dalam dunia medis sekarang, kita mengenalnya dengan konsep *social-phsycal distancing* (Hannan & Muhamimin, 2020).

Bersikap Moderat di Tengah Pandemi; sebuah Analisa Teoritik

Sebagai sebuah terminologi keagamaan, konsep moderasi beragama mengandung beberapa konsep dasar. Masdar Hilmy (dalam Zainuddin Syarif) menyebut ada dua konsep dasar dalam moderatisme, yakni *al-tawassut* (tengah) dan *al-i'tidal* (adil) (Syarif & Hannan, 2020). Pada kesempatan yang lain, beberapa pemikir Islam mengidentifikasi moderatisme sebagai perwujudan dari empat hal, meliputi; *al-adâlah* (adil), *al-tawassut* (tengah-tengah), *al-tawâzun* (keseimbangan), dan terakhir *al-tasâmuh* (toleran). Keempat dasar ini merupakan indikator moderat yang banyak dianuti oleh kebanyakan ormas Islam, termasuk oleh ormas Islam Nahdatul Ulama' (NU) selaku organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Bagi NU sendiri, baik *al-adâlah*, *al-tawassut*, *al-tawâzun*, dan *al-tasâmuh*, kesemuanya merupakan keluhuran beragama yang harus ditransformasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu sebagai ajaran maupun sebagai tindakan. (Barton & Fealy, 1996; Pribadi, 2013; Sitompul, 1989)

Pertama, *Al-adâlah* yang berarti keadilan, sama berat, tidak berat sebelah, berpegang teguh pada kebenaran; sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Beragama secara moderat berarti tidak memihak atau condong kepada kelompok manapun, kecuali pada objektivitas itu sendiri; kedua, *al-tawassut* yang artinya tengah-tengah, tidak condong dan tidak juga menitiberatkan pada kelompok dari sekian kelompok. Dalam beragama, *al-tawassut* berarti mengambil jalan tengah di antara dua kutub ekstrim. Tidak liberal tidak pula fundamentalis; ketiga, *al-tawâzun* yang memuat arti keseimbangan, yang berarti sama berat dan sebanding. Dalam beragama, konsep seimbang diterjemahkan dengan memperhatikan kebutuhan diri, antara kebutuhan *lahiriah* dan *bathiniah*, antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat; keempat, *al-tasâmuh* atau toleransi yang berarti masih

dalam batas ukur atau wajar yang masih diperbolehkan. Toleran dalam beragama itu artinya senantiasa memiliki kesediaan menerima realitas di luar dirinya, namun dengan tetap memperhatikan batas dan kewajarannya (Burhani, 2018; Fahri & Zainuri, 2019; Sitompul, 1989). Pertanyaan besarnya, bagaimana menginternalisasikan keempat konsep moderatisme di atas ke dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan Covid-19? Dalam konteks penanggulangan Covid-19, keempat dasar moderatisme di atas sejatinya masih dapat diperkecil lagi menjadi tiga konsep besar; rasional, inklusif, dan kontekstual.

a) Rasional

Rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan logis, berdasarkan pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Rasional memiliki makna normatif yang mengandung arti kesesuaian antara tindakan seseorang dan alasan mengapa dirinya bertindak. Rasional meniscayakan pada cara pikir sistematis, analitis, dan terstruktur (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999). Sistematias artinya berdasarkan pola pikir rapi dan saling terkait, analisis berarti dilandaskan oleh pembacaan mendalam, sedangkan berstruktur artinya pola pikir yang runtut berdasarkan pola dan bentuknya. Dalam perspektif ilmu logika, pentingnya bersikap rasional adalah supaya dapat menguraikan dan merumuskan suatu permasalahan dalam kerangka berpikir yang teratur dan logis, utuh, menyeluruh, dan terpadu, sehingga seseorang dapat menjelaskan rangkaian kausalitas sebab-akibat suatu permasalahan yang dialaminya secara objektif dan benar. Dengan bersikap rasional, selain dapat mendatangkan pola berpikir yang jernih dan runtut, pun dapat menghindarkan individu dari bersikap buta dalam menyikapi realitas. Lawan rasional adalah irasional, yang berarti tidak mendasarkan pada

penggunaan akal sehat, tidak masuk akal, karenanya setiap tindakannya sulit atau bahkan tidak dapat dijelaskan melalui hukum-hukum positif.

Moderatisme dalam arti rasional mengandaikan pada penggunaan nalar kritis, mengintegrasikan agama dan akal (sains) sebagai paradigma berpikir dan bersikap. Agama tidak saja dipahami sebagai sistem keyakinan (*believe*), namun juga sebagai sistem kepercayaan. Sehingga beragama secara *kaffah* tidak cukup sekadar dilandaskan pada kemantapan hati, tapi perlu diimbangi oleh aktivitas bernalar. Jika agama dipahami sebagai dimensi spiritualitas yang bersifat abstrak dan ghaib, maka akal beserta kemampuan bernalarnya memegangi peran dan fungsi strategis menjadikan yang abstrak tersebut menjadi logis. Dalam konteks penanggulangan Covid-19, bersikap moderat melalui sikap rasional mengandaikan pada kehadiran akal sehat dan penerimaan diri terhadap penggunaan perangkat ilmiah seperti penjelasan medis dan penerapan pengetatan perkumpulan dalam upaya memutus rantai penyebaran dan penularan Covid-19. Dengan menanamkan sikap dan perilaku rasional, maka inividu akan menjadi lebih terbuka terhadap segala bentuk pemikiran, termasuk di dalamnya adalah langkah medis yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya menangkal dan menekan penyebaran Covid-19. Konsep terbuka di sini bulan dalam arti bersikap inferior dan tunduk secara buta, namun lebih pada kesediaan diri melakukan komunikasi dan dialog dengan mempertimbangkan aspek kebermanfaatan dan risikonya.

b) Inklusif

Inklusif memiliki akar kata *inclusion* yang berarti mengajak masuk atau memgikutsertakan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, inklusif memuat arti terhitung, termasuk (Alwi, 2007). Pada lain Sedangkan secara terminologi, inklusif didefnisikan sebagai bentuk pemikiran, sikap, dan perilaku yang cenderung memposisikan dirinya ke dalam posisi yang sama

dengan orang atau kelompok lain, sehingga dengannya orang tersebut dapat memahami perspektif orang atau kelompok di luar dirinya. Inklusif membuat orang atau kelompok mempunyai perasaan sebagai bagian dari yang lain. Dengan perasaan tersebut, dirinya akan ter dorong untuk selalu membangun kebersamaan dan kolektivitas, menjalin dialog dalam rangka menjalin kerja sama dan menyamakan persepsi sehingga dengannya dapat diperoleh satu keputusan yang dapat mengakmodir kepentingan bersama. Lawan dari inklusif adalah eksklusif, yang berarti terpisah dari orang atau kelompok lain. Jauh berbeda dari inklusivisme, eksklusivisme mempunyai kecenderungan diri memandang golongan di luar dirinya sebagai *the others*, sehingga cara pandang demikian berdampak pada paradigma berpikir, sikap, dan perilaku diri yang lebih tertutup, normatif, dan kaku.

Dalam konteks penanggulangan Covid-19, moderatisme dalam arti inklusif berarti tidak memilih berseberangan dengan setiap apa yang telah disepakati bersama, khusunya yang sudah berbentuk kebijakan. Konkritnya, penanggulangan Covid-19 adalah satu perangkat kebijakan yang sudah melalui proses perhitungan dan kajian yang matang, melibatkan kehadiran para pakar yang memiliki kapasitas dan kepakaran teruji di bidagnya. Termasuk di dalamnya yaitu kebijakan protokol kesehatan seperti penerapan *social-physical distancing*, pembatasan aktivitas sosial yang berpotensi dapat mengundang keramaian, meski dalam bentuk kegiatan keagamaan sekalipun. Karenanya, sebagai kebijakan yang diambil atas dasar kepentingan dan kebaikan bersama, maka sudah seharusnya setiap elemen masyarakat ikut andil, mematuhi regulasi penanggulangan Covid-19 dalam rangka bergerak bersama menjalankan proses mitigasi, baik dalam bentuk pencegahan maupun penanggulangan. Bukan sebaliknya memisahkan diri dari kelompok, mengambil kebijakan kontra

produktif dengan regulasi yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah melalui jalan konsensus. Misal, tetap melaksanakan acara keagamaan yang mengundang kehadiran massa, melangsungkan kegiatan ritual keagamaan di tempat peribadatan umum tanpa menerapkan protokol kesehatan.

c) Kontekstual

Kontekstual berarti menekankan pada konteks (Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1999), merespon suatu permasalahan dengan tetap mempertimbangkan situasi yang berhubungan dengan kejadian. Dalam diksusrus ilmu sosial, pentingnya memahami realitas berdasarkan sudut pandang kontekstualnya, itu berangkat dari tesis hermenautika Hiedegar, bahwa setiap fenomena yang terjadi di tengah masyarakat memiliki latar sosial tersendiri. Tidak ada teks di dunia ini yang dapat benar-benar terlepas dari konteksnya, apakah teks itu berupa pemikiran, gagasan, teori, ataupun konsep. Teks tidak turun dalam dunia hampa, tidak pula turun dalam dunia antabrantah. Dirinya akan selalu menjalin ikatan dengan dimensi sosial. Karenanya, menurut Hiedegar, salah satu cara mencari keaslian makna dari sebuah realitas adalah dengan menelusuri konteks sosialnya.

Secara teoritik, bersikap moderat terhadap Covid-19 dalam arti kontekstual mengandaikan pada dua upaya sekaligus; *pertama*, upaya pencarian makna sesungguhnya (*original meaning*) dengan cara memperhatikan keaslian realitas atau kejadian. Ini dapat dilakukan dengan merujuk pada ruang dan waktu ketika fenomena tersebut muncul. Setiap teks memiliki konteksnya tersendiri, karenanya pencarian terhadap makna objektivitas hanya dapat memungkinkan manakala penafsir masuk ke dalam konteks tersebut. Begitupun dalam kasus Covid-19, pencarian atas kebenaran teologis Covid-19 harus juga disertai oleh penelusuran terhadap

konteks sosial di mana Covid-19 itu terjadi. Dan faktanya, dalam diskursus keislaman, kasus Covid-19 sesungguhnya bukan barang baru, melainkan sudah lama ada dan menemukan ruang kebenarannya semenjak era kehidupan para sahabat rosul. *Kedua*, mencari objektivitas makna dengan memperhatikan perkembangan atau perubahan sosial yang ada. Penelusuran terhadap keaslian makna suatu realitas tidak cukup dengan hanya memperhatikan aspek historis, namun juga harus diimbangi oleh pembacaan terhadap aspek perubahan sosial, atau dinamika secara menyeluruh. Hal ini penting dilakukan dalam rangka menghasilkan satu simpulan atau jawaban yang komprehensif, betul-betul dapat menjawab persoalan (Covid-19) yang dihadapi manusia pada masanya. Kaitannya dengan penanggulangan Covid-19, kontekstual dalam arti demikian dapat diimplementasikan dengan memperhatikan aspek sosial dan keseharian masyarakat seperti laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, meningginya gerak mobilitas, serta semakin kompleksnya aktivitas dan interaksi sosial masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, praktis akan membuat cara pandang kita melihat persoalan (Covid-19) menjadi lebih universal dan dinamis, sehingga putusan-putusan yang dihasilkan akan lebih kekinian, dengan artian mengandung korelasi dengan semangat zamannya.

SIMPULAN

Menggeliatnya konservatisme atas nama agama di tengah ancaman Covid-19, praktis mengundang seruan dan perhatian dari banyak pihak. Salah satunya adalah seruan untuk menghidupkan moderatisme beragama di tengah krisis sosial Covid-19. Bahwa program atau agenda mitigasi Covid-19 yang digalakkan pemerintah, itu akan berjalan efektif jika ada banyak penolakan atau pertentangan di tengah masyarakat. Salah satu

strategi menghadapi dan menyelesaikan penolakan tersebut adalah dengan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Sehingga dengan nilai moderasi tersebut, masyarakat akan memiliki sikap lunak dan lebih terbuka terhadap agenda mitigasi Covid-19 yang dibuat pemerintah. Baik mitigasi dalam bentuk pencegahan maupun penanggulangan. Pada tataran teoritiknya, penguatan moderatisme di tengah perilaku konservativisme beragama dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal; *pertama*, rasionalis, yakni menanamkan paradigma berpikir logis, senantiasa mendudukan permasalahan (Covid-19) dengan penggunaan nalar kritis dan sehat. Dengan rasionalisme, individu diharapkan dapat terlepas dari cara berpikir *oposisi binner*, tidak memposisikan agama dan ilmu pengetahaun (medis) secara berhadapan dan bertentangan, melainkan saling bersinergi dan menguatkan; *kedua*, inklusif. Inklusif berarti termasuk atau tergolong. Dengan sifat inklusif, individu atau kelompok masyarakat senantiasa akan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari yang lain, sehingga pada akhirnya mempunyai kesadaran diri untuk turut ambil bagian dalam masyakat, menjalakan sistem protokol kesehatan dalam rangka memutus rantai penyebaran dan penularan Covid-19 secara kolektif dan bersama; *ketiga*, kontekstual. Bersikap moderat dalam arti kontekstual berarti melihat permasalahan Covid-19 secara komprehensif. Terminologi komprehensif di sini mengandaikan pada dua aspek; 1) aspek historis, yakni mengkaji permasalahan Covid-19 dengan memperhatikan dimensi ruang-waktunya; 2) aspek sosiologis, yakni mengkaji Covid-19 dengan mempertimbangkan dinamika sosial yang ada seperti perubahan sosial, gerak mobilisasi masyarakat, pola interaksi, dan lain sebagainya.

REFERENCE

- (1) aljazeera.com. (2020, March 5). *Coronavirus is Changing the Way Muslims Worship Across the World.* <https://www.aljazeera.com/news/2020/03/muslims-advised-stop-coronavirus-spread-200304160256140.html>
- (2) Alwi, H. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka.
- (3) Amante, A. (2020, June 9). *Over Half of People Tested In Italy's Bergamo Have Covid-19 Antibodies.* The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/09/over-half-of-people-tested-in-italys-bergamo-have-covid-19-antibodies.html>
- (4) Azizah, N. (2020, March 17). *WHO: Social Distancing Saja tak Cukup.* Republika Online. <https://republika.co.id/berita/q7bn3g463/who-emsocial-distancingem-saja-tak-cukup>
- (5) Azra, A. (2019, August 1). *Konservatisme Agama.* Republika Online. <https://republika.co.id/berita/pvistt282/konservatisme-agama-1>
- (6) Barton, G., & Fealy, G. (1996). "Introduction". In *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*, edited by Greg Barton and Greg Fealy. Monash Asia Institute, Monash University.
- (7) BBC News. (2020a, March 19). Ijtimu di Gowa dan penahbisan uskup di Ruteng, Presiden Jokowi evaluasi acara keagamaan. *BBC News Indonesia.* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51956103>
- (8) Belarminus, R. (2020, March 19). *Ini Alasan Misa Penahbisan Uskup Ruteng Tak Bisa Ditunda.* KOMPAS.com. <https://regional.kompas.com/read/2020/03/19/12213691/ini-alasan-misa-penahbisan-uskup-ruteng-tak-bisa-ditunda>
- (9) Burhani, A. N. (2018). *Islam Nusantara as a Promising Response to Religious Intolerance and Radicalism.* ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- (10) Burhani, A. N. (2019). *Lessons from Madura: NU, Conservatism and the 2019 Presidential Election.* 2019, 9.
- (11) Burhani, A. N., & Simandjuntak, D. (2018). The Ma'ruf Amin Vice-presidential Candidacy: Enticing or Splitting Conservative Votes? *ISEAS - Yusof Ishak Institute*, 51(2018), 8.
- (12) Carvalho Aguiar Melo, M., & de Sousa Soares, D. (2020). Impact of social distancing on mental health during the COVID-19 pandemic: An urgent discussion. *International Journal of Social Psychiatry*, 002076402092704. <https://doi.org/10.1177/0020764020927047>
- (13) Chopra, A. (2020, June 16). *Saudi Faces Perilous Haj Call as Virus Spikes.* The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/16/saudi-faces-perilous-haj-call-as-virus-spikes.html>
- (14) Cook, T. M. (2020). Personal Protective Equipment During the Coronavirus Disease (COVID) 2019 Pandemic—a Narrative Review. *Anaesthesia*, 75(7), 920–927. <https://doi.org/10.1111/anae.15071>

- (15) Dariyanto, E. (2020, March 22). *Peringatan Isra Mikraj 1441 H di Tengah Wabah Virus Corona, Apa Hikmahnya?* detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4948724/peringatan-isra-mikraj-1441-h-di-tengah-wabah-virus-corona-apa-hikmahnya>
- (16) Departemen Pendidikan dan kebudayaan. (1999). *Kamus Besar bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*. Balai Pustaka.
- (17) Diah, S. R. (2020, May 18). *Terpukul Virus Corona, Jepang Alami Resesi Ekonomi*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/05/18/122555526/terpukul-virus-corona-jepang-alami-resesi-ekonomi?page=all>
- (18) Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). *Moderasi Beragama di Indonesia*. 25(2), 6.
- (19) Ghufron, F. (2020, March 18). *Virus Korona dan Teologi Kemaslahatan*. JawaPos.com. <https://www.jawapos.com/opini/18/03/2020/virus-korona-dan-teologi-kemaslahatan/>
- (20) Hamid, A. R. A. H. (2020). Social Responsibility of Medical Journal: A Concern for Covid-19 Pandemic. *Medical Journal of Indonesia*, 29(1), 1–3. <https://doi.org/10.13181/mji.ed.204629>
- (21) Hannan, A., & Muhammin, W. (2020). *Teologi Kemaslahatan Social-Phsyical Distancing dalam Penanggulangan Covid-19*. 13(1), 25.
- (22) Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid – 19 terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCoun Journal*, 2(1), 8.
- (23) Haryanto, E. (2019). Neo Sufisme dan Gerakan Sosial Agama-Politik di Madura. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3(1), 894–904.
- (24) Hilmy, M. (2009). *Teologi Perlawanan,: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*. Kanisius.
- (25) Hilmy, M. (2020, April 4). Sikap Ilmiah Menghadapi Pandemi Covid-19. *Kolom UINSA*. <https://w3.uinsby.ac.id/sikap-ilmiah-menghadapi-pandemi-covid-19/>
- (26) Ichsan, A. S. (2020, April 11). *Tiga Hadist tentang Thaun yang Mesti Anda Ketahui*. Republika Online. <https://republika.co.id/share/q8mbkw483>
- (27) Iswara, A. J. (2020, March 15). *Virus Corona Menyebar dari Tabligh Akbar, Malaysia Umumkan 190 Kasus Baru*. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/15/180803970/virus-corona-menyebar-dari-tabligh-akbar-malaysia-umumkan-190-kasus-baru>
- (28) Konservatisme Agama dan Penyebaran Korona. (n.d.). Retrieved 19 October 2020, from <https://mediaindonesia.com/read/detail/299238-konservatisme-agama-dan-penyebaran-korona>
- (29) Lazarus, N. (2020, April 26). *Coronavirus: Millions in India Facing Hunger During COVID-19 Lockdown Measures*. Sky News. <https://news.sky.com/story/coronavirus-millions-of-indians-facing-hunger-during-covid-19-lockdown-measures-11978857>
- (30) Lesmana, A. S. (2020, March 17). *32 Warga di Klaten ODP Virus Corona, Mayoritas Jemaah Pulang Umrah*. suara.com.

- <https://jateng.suara.com/read/2020/03/17/140328/32-warga-di-klaten-odp-virus-corona-majoritas-jemaah-pulang-umrah>
- (31) Li, J., Fink, J. B., & Ehrmann, S. (2020). High-Flow Nasal Cannula for COVID-19 Patients: Low Risk of Bio-Aerosol Dispersion. *European Respiratory Journal*, 55(5), 2000892. <https://doi.org/10.1183/13993003.00892-2020>
- (32) Li, R., Pei, S., Chen, B., Song, Y., Zhang, T., Yang, W., & Shaman, J. (2020). Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV-2). *Science*, 368(6490), 489–493. <https://doi.org/10.1126/science.abb3221>
- (33) Lvov, A. (2018). The burden of freedom: The doctrine of subject in Thomas Carlyle's works. *Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies*, 34. <https://doi.org/10.21638/spbu17.2018.407>
- (34) Martindale, D. (1964). Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective. Peter L. Berger. *American Journal of Sociology*, 70(1), 100–101. <https://doi.org/10.1086/223750>
- (35) Masruddin. (2020b, April 22). *Penanganan Covid-19 Versus Anakronisme Perspektif Sosial Budaya dan Konstruksi Pemahaman Keagamaan*. Tribun Timur. <https://makassar.tribunnews.com/2020/04/22/penanganan-covid-19-versus-anakronisme-perspektif-sosial-budaya-dan-konstruksi-pemahaman-keagamaan>
- (36) MUI. (2020, March 17). Fatwa No 14 Tahun 2020 –Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. *Majelis Ulama Indonesia*. <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>
- (37) News & Information. (n.d.). Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Retrieved 4 July 2020, from <https://coronavirus.jhu.edu/news>
- (38) Pandia, A. S. (2020, March 22). *Upacara Melasti di Petirtaan Jolotundo Mojokerto Berlangsung Singkat*. Kompas.Id. <https://kompas.id/baca/nusantara/2020/03/22/upacara-melasti-di-pentirtaan-jolotundo-mojokerto-berlangsung-singkat/>
- (39) Perdanakusuma. (2020, March 31). Menyikapi Kontroversi Informasi Ilmiah Covid-19. *Suara Merdeka News*. <https://suaramerdeka.news/menyikapi-kontroversi-informasi-ilmiah-covid-19/>
- (40) Prem, K., Liu, Y., Russell, T. W., Kucharski, A. J., Eggo, R. M., Davies, N., Jit, M., Klepac, P., Flasche, S., Clifford, S., Pearson, C. A. B., Munday, J. D., Abbott, S., Gibbs, H., Rosello, A., Quilty, B. J., Jombart, T., Sun, F., Diamond, C., ... Hellewell, J. (2020). The Effect of Control Strategies to Reduce Social Mixing On Outcomes of the Covid-19 Epidemic in Wuhan, China: A Modelling Study. *The Lancet Public Health*, 5(5), e261–e270. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30073-6](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30073-6)
- (41) Pribadi, Y. (2013). Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, and Kiai as the Core of Santri Culture. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 51(1), 1. <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.511.1-32>

- (42) Rahman, A., & Sarkar, A. (2019). Risk Factors for Fatal Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Infections in Saudi Arabia: Analysis of the WHO Line List, 2013–2018. *American Journal of Public Health*, 109(9), 1288–1293. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2019.305186>
- (43) Rina, R. (2020, February 11). *Terawan: Corona tak Masuk RI, Itu Berkat yang Maha Kuasa.* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200211162800-4-137044/terawan-corona-tak-masuk-ri-itu-berkat-yang-maha-kuasa>
- (44) Schnake-Mahl, A. S., Carty, M. G., & Sierra, G. (2020). Identifying Patients with Increased Risk of Severe Covid-19 Complications: Building an Actionable Rules-Based Model for Care Teams. *NEJM Group*, 13.
- (45) Shi, Z., & Hu, Z. (2008). A Review of Studies on Animal Reservoirs of The SARS Coronavirus. *Virus Research*, 133(1), 74–87. <https://doi.org/10.1016/j.virusres.2007.03.012>
- (46) Siswanto. (2020). The Islamic Moderation Values on the Islamic Education Curriculum in Indonesia: A Content Analysis. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 121–152. <https://doi.org/10.14421/jpi.2019.81.121-152>
- (47) Sitompul, E. M. (1989). *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*. Pustaka Sinar Harapan.
- (48) Syarif, Z., & Hannan, A. (2020). Kearifan Lokal Pesantren sebagai Bangunan Ideal Moderasi Islam Masyarakat Madura. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(2), 220–240. <https://doi.org/10.15642/islamica.2020.14.2.220-240>
- (49) Welle, D. (2020, April 1). *Tolak Karantina, Pemerintah Pakistan Gugup Hadapi Ulama.* DetikNews. <https://news.detik.com/dw/d-4961226/tolak-karantina-pemerintah-pakistan-gugup-hadapi-ulama>
- (50) Williams, N. (2020). Social Distancing in the Covid-19 Pandemic. *Occupational Medicine*, kqaa072. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqaa072>
- (51) Worldometer. (2020c, October 28). *United States Coronavirus: 9,034,232 Cases and 232,014 Deaths.* Worldometer. <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/>
- (52) Yu, P., Zhu, J., Zhang, Z., & Han, Y. (2020). Substantial Undocumented Infection Facilitates the Rapid Dissemination of Novel Coronavirus (SARS-CoV-2). *The Journal of Infectious Diseases*, 221(11), 1757–1761. <https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa077>
- (53) Yuniar, R. W. (2020, September 22). *Indonesia Kembali Diprediksi Dekati Jurang Resesi, ‘Teritori Negatif Akan Terjadi di Kuartal Tiga dan Mungkin Kuartal Empat’.* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53152994>